

PENGADILAN AGAMA DEMAK

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2020

Jl. Sultan Trenggono No. 23

Demak - Jawa Tengah 59516

Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014

e-mail : pademak01@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA DEMAK

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Sultan Trenggono No. 23

Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014

Demak - Jawa Tengah 59516

e-mail : pademak01@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Demak adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Demak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Demak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demak, 1 Juli 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

Hammad Al-Asy'ari, SH
NIP. 19801012.200312.1.003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	13
II. Neraca	15
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	20
V. Catatan atas Laporan Keuangan	22
A. Penjelasan Umum	22
A.1. Dasar Hukum.....	22
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Demak	23
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
A.4. Basis Akuntansi	25
A.5. Dasar Pengukuran	26
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	34
B.1. Pendapatan	34
B.2. Belanja.....	35
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	40
C.1. Aset Lancar.....	40
C.2. Aset Tetap	43
C.5. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	48
C.6. Utang Kepada Pihak Ketiga	49
C.7. Pendapatan Diterima di Muka	49
C.8. Uang Muka dari KPPN	49
C.9. Ekuitas.....	49

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	51
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	51
D.2.	Beban Pegawai	51
D.3.	Beban Persediaan	52
D.4.	Beban Barang dan Jasa	52
D.5.	Beban Pemeliharaan	53
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	53
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	54
D.8.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	55
D.9.	Beban Lain-lain.....	55
D.10.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	55
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	56
E.1.	Ekuitas Awal	56
E.2.	Surplus (defisit) LO	56
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	56
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	56
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	56
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	56
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	57
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	57
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	57
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	58
E.3.	Ekuitas Akhir.....	58
F.	PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	59
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	59
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	59
	Laporan-laporan Pendukung.....	65
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	66
	Daftar Hibah Langsung.....	69

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020.....	34
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020 dan 2019	35
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020	35
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020.....	36
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019	36
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019	37
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni TA 2019	38
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni TA 2019	39
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 2019.....	40
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019	40
Tabel 24 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2019	42
Tabel 25 Rincian Aset Tetap.....	43
Tabel 26 Rincian Saldo Tanah	44
Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	47
Tabel 38 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020.....	67
Tabel 38 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	70

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Demak

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak - Jawa Tengah 59516

Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014 e-mail : pademak01@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Demak Semester I Tahun 2020 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Demak telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demak, 1 Juli 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Hammad Al-Asy'ari,SH
NIP. 19801012.200312.1.003

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Demak Semester I Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 30 Juni 2020 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.785.449,00 atau mencapai 1047,14 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp648.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp2.244.101.994,00 atau mencapai 48,22 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4.653.601.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2020.

Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp18.198.164.530,00, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp31.433.150,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp18.161.831.380,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp4.900.000,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp18.000.000,00 dan Rp18.198.164.530,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa,

pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp234.450,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.333.898.682,00 sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp2.333.664.232,00) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan surplus (defisit) sebesar Rp7.272.499,00 sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar (Rp2.326.391.733,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp18.269.239.718,00 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp2.326.391.733,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.237.316.545,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp18.180.164.530,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA DEMAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 30 JUNI 2019
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2020			TA 2019
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	648.000	6.785.449	1047,14	234.450
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		648.000	6.785.449	1047,14	234.450
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	3.460.458.000	1.417.840.834	40,97	1.659.154.313
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.072.456.000	706.376.160	65,87	394.894.274
3.	Belanja Modal	B.2.3.	120.687.000	119.885.000	99,34	0
	Jumlah Belanja Negara		4.653.601.000	2.244.101.994	48,22	2.054.048.587

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA DEMAK
NERACA
PER 30 JUNI 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	18.000.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	13.433.150	3.011.400
Jumlah Aset Lancar		31.433.150	3.011.400
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	11.486.068.000	11.486.068.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.059.884.256	2.034.884.256
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6.757.354.089	6.662.469.089
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	43.184.651	43.184.651
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(2.184.659.616)	(1.951.527.828)
Jumlah Aset Tetap		18.161.831.380	18.275.078.168
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	7.400.000	7.400.000
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	159.899.373	159.899.373
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	(162.399.373)	(162.399.373)
Jumlah Aset		18.198.164.530	18.282.989.568
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.5			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	13.749.850
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	18.000.000	0

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	18.000.000	0
Jumlah Kewajiban	18.000.000	13.749.850
EKUITAS		
Ekuitas Dana Lancar	C.6	
Jumlah Ekuitas Dana	18.180.164.530	18.269.239.718
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	18.198.164.530	18.282.989.568

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA DEMAK
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2020 DAN 30 JUNI 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	234.450	234.450
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	1.415.840.393	1.659.154.313
Beban Persediaan	D. 3	5.773.250	10.457.500
Beban Barang dan Jasa	D. 4	391.167.178	186.662.137
Beban Pemeliharaan	D. 5	268.576.073	163.247.027
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	19.410.000	25.680.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	233.131.788	184.303.002
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		2.333.898.682	2.229.503.979
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2.333.664.232)	(2.229.269.529)
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		6.550.999	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		721.500	212.850
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		7.272.499	212.850

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(2.326.391.733)	(2.229.056.679)
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(2.326.391.733)	(2.229.056.679)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA DEMAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2020 DAN 30 JUNI 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Ekuitas Awal	E. 1	18.269.239.718	16.137.531.972
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(2.326.391.733)	(2.229.056.679)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	2.237.316.545	2.053.814.137
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(89.075.188)	(175.242.542)
Ekuitas Akhir		18.180.164.530	15.962.289.430

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang

Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
- q. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Demak

Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak

Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak Tahun 2015-2020 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Demak Tahun 2010-2014 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2020.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak

Visi Pengadilan Agama Demak adalah terwujudnya Pengadilan Agama demak yang mandiri dan profesional dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung.

Misi Pengadilan Agama Demak adalah:

1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.
6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Demak melakukan beberapa langkah-langkah strategis yaitu melaksanakan program yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung tentang Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035.

Ada 10 karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen yang jelas dan terukur;
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional dan adil;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas profesional;
7. Pengawasan perilaku, administrasi dan keuangan yang efektif;

8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan;
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Demak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Demak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

-) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
-) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

-) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

-) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
-) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
- Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
-) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

-) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
-) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
-) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
-) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

-) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
-) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
-) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

-) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
-) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
-) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
-) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

-) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
-) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

-) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
-) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
-) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu

rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
-) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

-) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
-) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
-) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
-) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
-) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

-) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

-) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
-) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2.) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

) Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Badan Urusan Administrasi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Tahun 2020	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	648.000	648.000
Jumlah Pendapatan	648.000	648.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3.460.458.000	3.460.458.000
Belanja Barang	1.072.456.000	1.072.456.000
Belanja Modal	120.687.000	120.687.000
Jumlah Belanja	4.653.601.000	4.653.601.000

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan :
Rp6.785.449,00*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp.6.785.449,00 atau mencapai 1047,14 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.648.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Demak adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Akun	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
125131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	648.000	6.785.449	1047,14
	Total Pendapatan	648.000	6.785.449	1047,14

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.550.999,00 atau 2794,20 persen dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan karena adanya pendapatan yang berasal dari lelang penjualan mebelair dan peralatan dan mesin melalui KPKNL Semarang.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	234.450	234.450	0	0,00
2.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	6.550.999	0	6.550.999	100,00
Total Pendapatan		6.785.449	234.450	6.550.999	2794,20

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp 2244.101.994,00

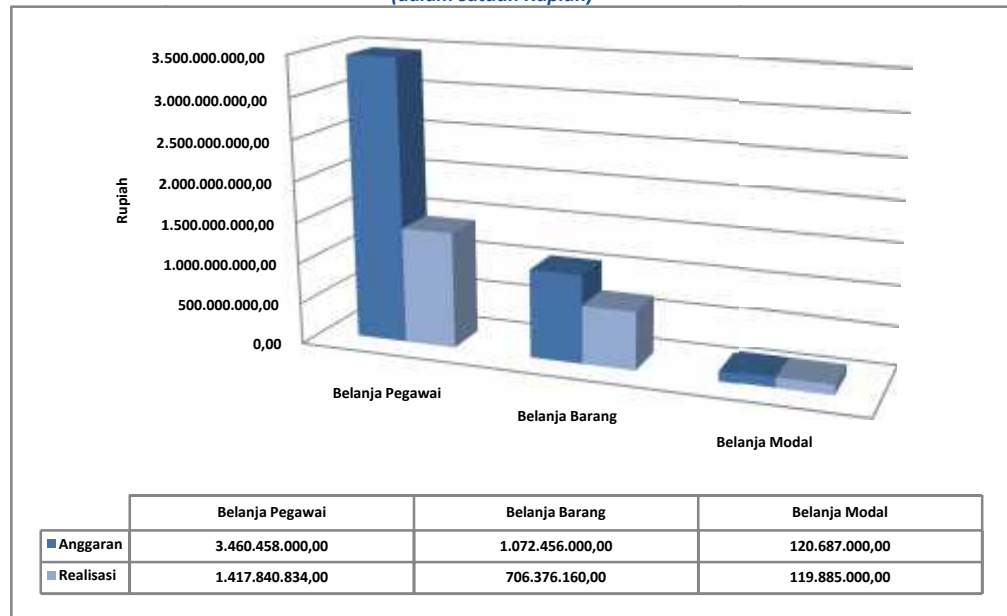
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Demak per 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp. 2.244.101.994,00 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 48,22% dari anggaran senilai Rp. 4.653.601.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada periode 30 Juni 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian	30 Juni TA 2020		
		Pagu	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	3.460.458.000	1.417.840.914	40,97
52	Belanja Barang	1.072.456.000	706.376.160	65,57
53	Belanja Modal	120.687.000	119.885.000	99,34
Total Belanja Bruto		4.653.601.000	2.244.102.074	45,22
Pengembalian Belanja			(80)	0
Total Belanja Netto		4.653.601.000	2.244.101.994	45,22

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2020 & 2019

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 190.051.484,00 atau sebesar 9,25 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Terealisasinya belanja Modal pada tahun anggaran 2020.
2. Terealisasinya pemeliharaan gedung bangunan pada semester 1 2020.

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
				Rp	%
51	Belanja Pegawai	1.417.840.834	1.659.156.236	(241.315.402)	(14,54)
52	Belanja Barang	706.376.160	394.894.274	311.481.886	78,88
53	Belanja Modal	119.885.000	0	119.885.000	100
	Total Belanja	2.244.101.994	2.054.048.587	190.051.484	9,25

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai : Rp
1.417.540.914,00

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Demak per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 1.417.840.914,00 dan Rp. 1.659.154.313,00.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami penurunan sebesar 14,54 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belum cairnya gaji ke 13 pada semester I tahun anggaran 2020.
2. Adanya empat orang hakim yang mutasi di akhir tahun tanpa ada Hakim yang masuk, Gaji THR untuk Golongan IV/b tidak bisa di cairkan karena adanya pandemi covid 19.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 6 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	650.671.740	631.535.280	19.136.460	3,03
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.555	10.420	135	1,30
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	55.755.550	54.893.670	861.880	1,57
Beban Tunj. Anak PNS	18.451.570	18.531.520	(79,950)	(0,43)
Beban Tunj. Struktural PNS	18.200.000	18.200.000	0	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	492.635.000	732.700.000	(240.065.000)	(32,76)
Beban Tunj. PPh PNS	53.144.919	90.059.506	(36.914.587)	(40,99)
Beban Tunj. Beras PNS	36.137.580	32.733.840	3.403.740	10,40
Beban Uang Makan PNS	91.539.000	79.752.000	11.787.000	14,78
Beban Tunjangan Umum PNS	1.295.000	740.000	555.000	75,00
Total Belanja Brutto	1.417.840.914	1.659.156.236	(294.436.314)	(14,54)
Pengembalian Belanja	(80)	(1.923)	(2.003)	(104,16)
Total Belanja Netto	1.417.840.834	1.659.154.313	(241.313.479)	(14,54)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi Belanja
Barang :
Rp706.376.160,00*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Demak per 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni TA 2019 adalah sebesar Rp. 706.376.160,00 dan Rp. 394.894.274,00.

Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.311.481.886,00 atau 78,88 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya anggaran langganan Internet dedicate.
2. Naiknya realisasi pemeliharaan gedung dan halaman.
3. Naiknya realisasi langganan daya dan jasa.
4. Naiknya realisasi barang persediaan.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	317.032.000	144.485.700	172.546.300	119,42
Belanja Barang Persediaan	15.473.500	5.755.000	9.718.500	168,87
Belanja Jasa	85.884.587	55.726.547	30.158.040	54,12
Belanja Pemeliharaan	268.576.073	163.247.027	105.329.046	64,52
Belanja Perjalanan Dinas	19.410.000	25.680.000	(6.270.000)	(24,42)
Total Belanja Brutto	706.376.160	394.894.274	311.481.886	78,88
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	706.376.160	394.894.274	311.481.886	78,88

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi Belanja
Modal
:Rp119.885.000,
00*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Demak per 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni TA 2019 adalah sebesar Rp. 119.885.000,00 dan Rp. 0,00.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019. Hal ini disebabkan realisasi belanja modal telah dilaksanakan pada semester I.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	25.000.000	0	25.000.000	100
Belanja Modal Lainnya	94.885.000	0	94.885.000	100
Total Belanja Brutto	119.885.000	0	119.885.000	100
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	119.885.000	0	119.885.000	100

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
31.433.150,00

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.31.433.150,00 dan Rp. 3.011.400,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Demak per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	18.000.000	0
Belanja Dibayar di Muka	0	0
Persediaan	13.433.150	3.011.400
Total Aset Lancar	31.433.150	3.011.400

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp
18.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 18.000.000 dan Rp. 0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Keterangan	30 Juni TA 2020	31 Desember TA 2019
1	Uang Persediaan per 30 Juni 2020	18.000.000,00	0,00
	Jumlah	18.000.000,00	0,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Demak per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Kuitansi yang belum di GU kan	18.000.000,00
2	Di Rekening Bank	0,00
	Total	18.000.000,00
	LS Bendahara	0,00
	Pajak	0,00
	Total Aset Lancar	18.000.000,00

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

*Piutang Bukan
Pajak Rp.0,00*

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, tidak ada transaksi. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih-
Piutang Bukan
Pajak Rp.0,00*

C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00, tidak ada transaksi. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

*Bagian Lancar
Tagihan*

*Tuntutan Ganti
Rugi Rp.0,00*

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar pada Badan Urusan Administrasi berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada transaksi. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Bagian Lancar
Tagihan
Tuntutan Ganti
Rugi (TGR)
Rp0,00*

C.1.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesarRp0,00, tidak ada transaksi.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

C.1.7. Persediaan

*Persediaan:
Rp13.433.150,0
0*

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.13.433.150,00 dan Rp.3.011.400,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp.28.421.750,00 atau 346,07 persen.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Uraian	30 Juni 2020	Mutasi	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	13.433.150,00	3.011.400,00	10.421.750,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00

3	Persediaan lainnya	0,00	0,00	0,00
Total		13.433.150,00	3.011.400,00	10.421.750,00

Nilai persediaan diatas berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Nomor : W11-A15/2037/PL.06/VI/2020. Jumlah persediaan yang rusak/usang yaitu atas barang konsumsi senilai Rp0,00 dan tidak disajikan dalam neraca pada persediaan.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
18.161.831.380
.00*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 2019 tersaji sebesar Rp.18.161.831.380,00 dan Rp.18.275.078.168,00. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 12 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan
1	Tanah	11.486.068.000	11.486.068.000	0,00
2	Peralatan dan Mesin	2.059.884.256	2.034.884.256	25.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan	6.757.354.089	6.662.469.089	94.885.000,00
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	43.184.651	43.184.651	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0,00
Jumlah		20.346.490.996	20.226.605.996	119.885.000
Akumulasi Penyusutan		(2.184.659.616)	(1.951.527.828)	(233.131.788)
Nilai Buku Aset Tetap		18.161.831.380	18.282.989.568	(113.246.788)

*Persediaan yang
belum dregister
Rp.0,00*

C.2.1. Persediaan Yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang belum diregister per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 0,00 dan Rp0,00, atau tidak ada transaksi.

C.2.2. Tanah

*Tanah:
Rp11.486.068.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 11.486.068.000,00 dan Rp. 11.486.068.000,00.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 13 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB/NU P	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Alamat Lokasi Tanah	Atas Nama	Perunt ukan	Jumlah
1	Tanah/1	7.546	Nomor:70 Tanggal 08 Agustus 2008	Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI	Kantor	11.486.068.000
Jumlah							11.486.068.000

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	11.486.068.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	11.486.068.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	11.486.068.000

C.2.3. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
2.059.884.256,00*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.059.884.256,00 dan Rp. 2.034.884.256,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	2.034.884.256,00
Pembelian	25.000.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	25.000.000,00
Transfer Keluar	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2020	2.059.884.256,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	2.059.884.256,00

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin tidak mengalami perubahan per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, hal ini dikarenakan tidak adanya belanja modal tanah.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
6.757.354.089,00*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.757.354.089,00 dan Rp. 6.662.469.089,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	6.662.469.089,00
Pembelian	94.885.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	94.885.000,00
Transfer Keluar	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2020	6.757.354.089,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	6.757.354.089,00

Tidak ada perubahan dalam aset tetap gedung dan bangunan pada semester I 2020. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.6. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
43.184.651,00*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan

Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 43.184.651,00 dan Rp. 43.184.651,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	43.184.651,00
Pembelian	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Transfer Keluar	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2020	43.184.651,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	43.184.651,00

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.7. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
(2.184.659.616)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp(2.184.659.616,00) dan Rp(1.951.527.828,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 14 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.059.884.256	1.592.295.678	446.395.517
2	Gedung dan Bangunan	6.757.354.089	592.363.938	5.380.678.262
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	43.184.651	0	43.184.651
Jumlah		8.860.422.996	2.184.659.616	5.870.258.430

C.4.1. Aset tak berwujud

*Aset tak
Berwujud :
Rp 7.400.000*

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.400.000,- dan Rp.7.400.000,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Pengadilan Agama Demak berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Demak berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai Berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	7.400.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2020	7.400.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	7.400.000,00

Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2020.

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp159.899.373,
00

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 159.899.373,00 dan Rp. 159.899.373,00. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Demak serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	159.899.373,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2020	159.899.373,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	159.899.373,00

Aset Lain-Lain yang terjadi pada Pengadilan Agama Demak antara lain Usulan Barang Rusak Berat (RB) ke Pengelola Barang disebabkan karena adanya lelang mebeulair dan peralatan dan mesin yang telah mengalami rusak berat dan tidak di pakai lagi di lelang pada tanggal 14 Mei 2020 melalui KPKNL Semarang dengan Nomor Risalah Lelang 387/37/2020. Mengurangi Aset Lainnya (aset tetap yang tidak digunakan operasi pemerintah) senilai total Rp159.899.373,00. Pada saat ini masih dalam proses pengajuan permohonan ijin penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan kepada Biro Perlengkapan MA RI.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp.(162.399.373
,00)

C.5. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp(162.399.373,00) dan Rp(162.399.373,00).

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp.0,00*

C.6. Utang Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp13.749.850,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Pendapatan
Diterima
Dimuka Rp.0,00*

C.7. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

C.8. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp
18.000.000,00*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 18.000.000,00 dan Rp. 0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.9. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp
18.180.164.530,
00*

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp18.180.164.530,00 dan Rp18.269.239.718,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan Pnbp : Rp234.450 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp234.450,00 dan Rp234.450,00 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Perbandingan Rincian Pendapatan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	234.450	234.450	0,00
Total Pendapatan		234.450	234.450	0,00

Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari sewa gedung dan bangunan pada Gedung Rumah Dinas Ketua Jl. Sultan Fattah No. 12.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 1.415.840.393,00 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.415.840.393,00 dan Rp1.659.154.313,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	649.636.540	631.535.280	18.101.260	2,87
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.162	8.497	1.665	19,60
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	55.652.030	54.893.670	758.360	1,38
Beban Tunj. Anak PNS	18.410.162	18.531.520	(121.358)	(0,65)

Beban Tunj. Struktural PNS	18.200.000	18.200.000	0	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	492.635.000	732.700.000	(240.065.000)	(32,76)
Beban Tunj. PPh PNS	53.144.919	90.059.506	(36.914.587)	(40,99)
Beban Tunj. Beras PNS	36.137.580	32.733.840	3.403.740	10,40
Beban Uang Makan PNS	90.719.000	79.752.000	10.967.000	13,75
Beban Tunjangan Umum PNS	1.295.000	740.000	555.000	75,00
Total Beban Pegawai	1.415.840.393	1.659.154.313	(243.313.920)	(14,66)

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan :
Rp5.773.250,00*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.773.250,00 dan Rp10.457.500,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	5.773.250	10.457.500	(4.684.250)	(44,79)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	5.773.250	10.457.500	(4.684.250)	(44,79)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa :
Rp391.167.178,00*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp391.167.178,00 dan Rp186.662.137,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	258.213.500	102.033.200	156.180.300	153,07

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	386.000	381.500	4.500	1,18
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	17.000.000	17.000.000	0	0
Beban Barang Operasional Lainnya	41.142.500	23.160.200	17.982.300	77,64
Beban Bahan	0	0	0	0
Beban Langganan Listrik	52.355.292	40.094.745	12.260.547	30,58
Beban Langganan Telepon	875.786	1.226.022	(350.236)	(28,57)
Beban Langganan Air	2.594.100	2.766.470	(172.370)	(6,23)
Beban Sewa	18.600.000	0	18.600.000	100
Total Beban Barang dan Jasa	391.167.178	186.662.137	204.505.041	109,56

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp268.576.073*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp268.576.073,00. dan Rp163.247.027,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	212.040.000	139.455.900	72.584.100	52,05
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49.153.073	23.791.127	25.361.946	106,60
Beban Pemeliharaan lainnya	7.383.000	0	7.383.000	100
Total Beban Pemeliharaan	268.576.073	163.247.027	105.329.046	64,52

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp19.410.000,0
0*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp19.410.000,00. dan Rp25.680.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	19.410.000	25.680.000	(6.270.000)	(24,42)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0,00
Total Beban Perjalanan Dinas	19.410.000	25.680.000	(6.270.000)	(24,42)

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp233.131.788,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp233.131.788,00. dan Rp184.303.002,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	113.523.307	89.181.714	24.341.593	27,29
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	119.608.481	95.121.288	24.487.193	25,74
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	233.131.788	184.303.002	48.828.786	26,49
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	233.131.788	184.303.002	48.828.786	26,49

D.8. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

D.9. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.10. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp7.272.499,00*

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	6.550.999	0	6.550.999	100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	881.350	21.850	668.500	314,07
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(159.850)	0	(159.850)	(100,00)
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	7.272.499	212.850	7.059.649	3.316,70

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.18.269.239.7
18,00 Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp18.269.239.718,00. Dan Rp16.137.531.972,00.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus (deficit)
LO
Rp.(2.326.391.7
33) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp(2.326.391.733). dan Rp(2.229.056.679). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp.0,00 Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp.0,00 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- Dan Rp0,-.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp.0,00 . Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Revaluasi Aset tersebut berasal dari adanya revaluasi aset tetap Pengadilan Agama Demak oleh KPKNL Semarang pada semester pertama tahun 2020.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp.0,00 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi

nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-
Lain Rp.0,00*

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi antar
entitas
Rp.2.237.316.54
5,00*

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.237.316.545,00. dan Rp2.053.814.137,00.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(6.785.449)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.244.101.994
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	2.237.316.545

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar Rp(6.785.449,00) sedangkan DKEL sebesar Rp2.244.101.994,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, sebesar Rp.0,-, dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2020 .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 , adalah Rp0.

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp18.180.164.530,00 dan Rp15.962.289.430,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat informasi mengenai temuan dan tindak lanjut temuan BPK pada Laporan Keuangan Semester I.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada Laporan Keuangan Semester I dan Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan disajikan pada laporan keuangan semester II.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Demak adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) A/C 0016-01-000299-30-1 a.n. BPG 129 PENGADILAN AGAMA DEMAK dengan nomor persetujuan rekening S-225/WPB.14/129/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.0.

F.2.4. Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Demak Tahun Anggaran 2019 bernomor : DIPA-005.01-2.400942/2020 tanggal 12 November 2019 berjumlah sebesar Rp4.653.601.000,00 (Empat miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. DIPA Awal.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.01		
1066.994.001	511111	1.135.638.000,00
	511119	25.000,00
	511121	106.601.000,00
	511122	33.887.000,00
	511123	36.400.000,00
	511124	1.485.750.000,00
	511125	275.387.000,00
	511126	83.722.000,00
	511129	280.368.000,00
	511151	22.680.000,00
1066.994.002	521111	213.350.000,00
	521811	28.826.000,00
	521119	15.000.000,00
	521111	158.500.000,00
	521114	1.200.000,00
	522111	120.000.000,00
	522112	9.000.000,00
	522113	12.000.000,00
	523111	222.322.000,00
	523119	7.600.000,00
	523121	87.030.000,00
	521115	42.000.000,00
	521119	14.436.000,00
	522141	64.800.000,00
	521119	5.460.000,00
	521119	6.480.000,00
	524119	11.162.000,00
	524111	37.300.000,00

	524111	15.990.000,00
1071.951.051	532111	25.000.000,00
	533121	95.687.000,00
	Total	4.653.601.000,00

2. Revisi 1 (12 Februari 2020).

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.01		
1066.994.001	511111	1.135.638.000,00
	511119	25.000,00
	511121	106.601.000,00
	511122	33.887.000,00
	511123	36.400.000,00
	511124	1.485.750.000,00
	511125	275.387.000,00
	511126	83.722.000,00
	511129	280.368.000,00
	511151	22.680.000,00
1066.994.002	521111	213.350.000,00
	521811	20.489.000,00
	521119	25.000.000,00
	521111	158.500.000,00
	521114	1.200.000,00
	522111	120.000.000,00
	522112	9.000.000,00
	522113	12.000.000,00
	523111	212.299.000,00
	523119	7.600.000,00
	523121	80.990.000,00
	521115	40.800.000,00
	521119	14.436.000,00

	522141	64.800.000,00
	521119	5.460.000,00
	521119	6.480.000,00
	524119	11.162.000,00
	524111	37.300.000,00
	524111	15.990.000,00
1071.951.051	532111	25.000.000,00
	533121	95.687.000,00
	Total	<u>4.653.601.000,00</u>

3. Revisi 2 (22 Juni 2020)

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.01		
1066.994.001	511111	1.135.638.000,00
	511119	25.000,00
	511121	106.601.000,00
	511122	33.887.000,00
	511123	36.400.000,00
	511124	1.485.750.000,00
	511125	275.387.000,00
	511126	83.722.000,00
	511129	280.368.000,00
	511151	22.680.000,00
1066.994.002	521111	213.850.000,00
	521811	15.645.000,00
	521119	27.000.000,00
	521111	158.500.000,00
	521114	1.200.000,00
	522111	120.000.000,00
	522112	9.000.000,00
	522113	24.000.000,00

	523111	225.103.000,00
	523119	7.600.000,00
	523121	76.990.000,00
	521115	40.800.000,00
	521119	14.436.000,00
	522141	64.800.000,00
	521119	5.460.000,00
	521119	6.480.000,00
	524119	11.162.000,00
	524111	37.300.000,00
	524111	13.130.000,00
1071.951.051	532111	25.000.000,00
	533121	95.687.000,00
	Total	4.653.601.000,00

F.2.5. Penjelasan Terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian

Jurnal Penyesuaian pada tanggal 8 Januari 2020 merupakan jurnal balik dari penyajian akrual tahun anggaran yang lalu.

Akun	Uraian	Jurnal Balik Per Januari 2020
522111	Belanja Langganan Listrik	10.103.886
522112	Belanja Langganan Telepon	391.503
522113	Belanja Langganan Air	964.020
521111	Belanja Langganan Koran	290.000
521111	Belanja Uang Makan	820.000
511111	Belanja Pegawai Gaji Pokok	1.035.200
511119	Belanja Pegawai Pembulatan Gaji	313
511121	Belanja Pegawai Tunj. Suami/Istri	103.520
511122	Belanja Pegawai Tunj. Anak	41.408
	JUMLAH	13.749.850

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Terdapat Informasi mengenai Ralat SSBP Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara yaitu Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin akun 425122 sejumlah Rp.6.550.999,- dari

hasil lelang melalui KPKNL Semarang tanggal setor 15 Mei 2020, yang semula di input unit eselon 1 Ditjen Badan Peradilan Agama 04 kode satker 400943. Pengadilan Agama Demak mengajukan Perbaikan transaksi Penerimaan Negara melalui KPPN Kudus dan telah keluar hasil perbaikan transaksi penerimaan Negara dengan Nomor S-173/WPB.14/KP.05/2020 kemudian beralih ke unit eselon I Badan Urusan Administrasi 01 kode satker 400942.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada tambahan catatan penting lainnya.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Demak

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2019	2020	Per 30 Juni 2020	Per 30 Juni 2020
A.	Peralatan dan Mesin						
1.	Alat Bantu	7	99.750.000	99.750.000	0	99.750.000	0
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	410.314.117	384.635.545	12.839.286	397.474.831	12.839.286
3.	Alat Kantor	5	168.022.998	111.659.298	10.378.300	121.887.598	46.135.400
4.	Alat Rumah Tangga	5	694.705.497	525.144.649	27.787.548	552.932.197	141.773.300
5.	Alat Studio	5	47.913.000	23.724.300	4.584.500	28.308.800	19.604.200
6.	Alat Komunikasi	5	10.837.316	10.837.316	0	10.837.316	0
7.	Komputer Unit	4	403.716.376	216.758.125	40.146.051	256.904.176	146.812.200
8.	Peralatan Komputer	4	193.449.237	102.453.423	16.831.622	119.285.045	74.164.192
9.	Alat Kerja Penerbangan	5	49.060.000	12.265.000	2.453.000	14.718.000	34.342.000
10.	Peralatan Olah Raga	3	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
B.	Gedung dan Bangunan						
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	6.316.597.089	439.320.985	111.249.863	550.570.848	5.766.026.241

2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	133.668.000	14.852.000	3.713.000	18.565.000	115.103.000
3.	Tugu/tanda Batas	50	307.089.000	18.582.472	4.645.618	23.228.090	283.860.910
C. Jalan, Irigasi, dan Jaringan							
1.	Jalan	10	-	-	-	-	-
2.	Jaringan Air Minum	30	-	-	-	-	-
3.	Jaringan Listrik	40	-	-	-	-	-
4.	Jaringan Telepon	20	-	-	-	-	-
D. Aset Tetap Lainnya							
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-	-	-	-	-
E. Aset Tetap yang Tidak Digunakan							
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	-	-	-	-	-
2.	Alat Kantor	5	7.694.485	7.694.485	-	7.694.485	-
3.	Alat Rumah Tangga	5	26.901.054	26.901.054	-	26.901.054	-
4.	Alat Komunikasi	5	127.098	127.098	-	127.098	-
5.	Komputer Unit	4	103.958.369	103.958.369	-	103.958.369	-
6.	Peralatan Komputer	4	21.218.367	21.218.367	-	21.218.367	-
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			8.996.522.003	2.121.382.486	234.478.788	2.355.861.274	6.640.660.729
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya			8.996.522.003	2.121.382.486	234.478.788	2.355.861.274	6.640.660.729

Pengadilan Agama Demak
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
	NIHIL	U					
	Jumlah :						

